

Penerapan SAKTI dalam Sistem Informasi Akuntansi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur

Maulida Rizki Nur Hanifa Ismail¹, Sasmito Jati Utama^{2*}

^{1,2}Program Studi Administrasi Publik,
Universitas Hang Tuah, Indonesia

*Corresponding author: sasmitomojopahit9@gmail.com

Abstract

Financial Application System in Institutional Level (SAKTI) is the embodiment of an integrated state financial management information system. In this application, there is an effective and transparent financial management function covering budgeting, implementation, and financial accountability. This study aims to describe and analyze the application of SAKTI, the factors that supporting and inhibiting its application at the Regional Office of the Directorate General of Treasury East of Java Province. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The data collection techniques are observation, interview, documentation, and studying literature. The determination of research subjects was carried out by a purposive sampling technique. The analysis in this study is based on the concept of an Accounting Information System by Romney & Steinbart (2016) that were using 6 research components namely people, procedures, data, software, information technology infrastructure, and internal control. The results showed that the application of SAKTI had been carried out optimally and the data found was in accordance with the six research components. Supporting factors in research are the existence of cooperation with partners, good budget planning, and a clear legal basis. The inhibiting factor in this study was the emergence of problems with employee workload and telecommunication network.

Keywords: Financial, Information, System, East Java.

I. Pendahuluan

Dalam sebuah tatanan pemerintahan, dinamika modernisasi akan terus bertransformasi dan berkembang khususnya dalam hal sistem manajemen atau tata laksana pemerintahan. Tuntutan akan adanya tata pemerintahan yang baik merupakan penyelenggaraan dan pengaturan negara yang sejalan dengan kemajuan pengetahuan akibat pengaruh globalisasi. Indonesia berupaya semaksimal mungkin menghasilkan begitu banyak aturan hukum dan organisasi pelaksana pemerintahan baru. Salah satu bentuk regulasi dalam penyelenggaraan negara adalah regulasi mengenai proses pengelolaan keuangan negara yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Regulasi ini berisi seluruh mekanisme yang berhubungan dengan segala sesuatu yang memiliki harta kekayaan yang bersumber dari penerimaan negara.

Guna meningkatkan upaya mendukung terlaksananya akuntabilitas keuangan maka Pemerintah Indonesia bersama Kementerian Keuangan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dengan menerapkan konsep *Integrated Financial Management Information System*. Konsep ini berguna untuk menjadikan penggunaan informasi yang terintegrasi menjadi satu sistem sehingga mengurangi permasalahan pada proses akuntansi. Rencana optimalisasi sistem yang terintegrasi ini bertujuan mempermudah proses

perencanaan, pengesekusian, serta pengawasan setiap anggaran yang berperan dalam proses pelaporan pendapatan serta pengeluaran dana anggaran.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Perbendaharaan berinovasi membuat wadah aplikasi dengan menyederhanakan sistem yang jumlahnya sangat banyak pada tiap satuan kerja menjadi satu aplikasi dalam satu basis data yang dinamakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dalam Pasal 1 Permenkeu No. PMK-159/PMK.05/2018 diartikan sebagai aplikasi guna mendukung sistem anggaran serta perbendaharaan di instansi Pemerintah. Sistem ini didukung dengan fitur utama antara lain: digunakan oleh seluruh satker Kementerian atau Lembaga, disertai dengan pengamanan data serta desain konsep sistem yang sederhana.

II. Landasan Teori

Electronic Government

Penggunaan teknologi akan sangat membantu mengurangi penipuan dan kecurangan. *Electronic Government (E-Government)* merupakan sebuah transformasi dari penggunaan teknologi berdasarkan jaringan komunikasi online dan terkoneksi menyeluruh untuk melayani masyarakat umum, instansi pemerintah, maupun sektor swasta guna menambah efektivitas kinerja serta fungsi organisasinya. *Electronic Government* digambarkan sebagai alat pembantu berbasis pada teknologi elektronik kerja pemerintah sehingga memberikan kemudahan kerja yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Menurut regulasi Inpres RI No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, penggunaan informasi diatur guna mencakup kemudahan kegiatan pelaksanaan yang saling berkaitan dengan layanan antar pemerintah, manajemen informasi, aktivitas teknologi, maupun data elektronik.

Sistem Informasi Akuntansi

Dalam sektor akuntansi keuangan, informasi keuangan sangat penting diperlukan untuk menjadi dasar instansi mengambil keputusan. Sistem Informasi Akuntansi juga bisa diartikan sebagai keseluruhan kegiatan meliputi mengelompokkan, menggolongkan, mencatat, sampai memproses suatu kegiatan dalam bidang bisnis dan ekonomi. Oleh karena itu, suatu sistem sangat penting perannya guna memberikan hasil laporan keuangan yang baik. Marshall Romney dan Paul Steinbart (2016) berpendapat bahwa dalam menerapkan Sistem Informasi Akuntansi terdapat enam komponen yang penting dalam sistem antara lain adalah: *people, procedure, data, software, infrastructure technology information*, dan pengendalian internal. Enam komponen yang telah disebutkan tersebut diperlukan untuk melihat bagaimana baik dan buruknya pengelolaan keuangan negara khususnya dengan memanfaatkan fungsi teknologi informasi.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

SAKTI meliputi semua sistem pengelolaan keuangan Kementerian dan Lembaga secara horizontal dan vertikal yang dimulai dengan analisis sistem yang digunakan diantaranya: Sistem Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga yang disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (RKA/KL DIPA), Sistem Aplikasi Satker (SAS) yang digunakan dalam pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), Sistem Laporan Bendahara Instansi (Silabi), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Aplikasi Persediaan, dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA). Melalui SAKTI, pelayanan terkait pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya cukup banyak dan berdiri masing-masing dipersatukan menjadi satu aplikasi dengan basis data terintegrasi.

III. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dipilih karena untuk memperoleh pandangan secara luas yang digambarkan, dijelaskan, dan diungkapkan mengenai fakta di lapangan. Fokus penelitian dilandaskan pada konsep Sistem Informasi Akuntansi menurut Marshall Romney & Paul Steinbart (2016) yang terdiri dari *people*, *procedure*, *data*, *software*, *infrastructure* *technology information*. Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang bertempat di Jalan Indrapura Nomor 5, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena instansi merupakan salah satu unit yang turun berkontribusi dalam pembuatan SAKTI.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif dilakukan menggunakan *purposive sampling*. Adapun dalam penelitian ini, informan yang dijadikan sebagai sampel yaitu pegawai SubBagian Keuangan Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur yang dianggap mengerti mengenai informasi penerapan aplikasi SAKTI. Untuk mendapatkan keseluruhan informasi dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, serta melalui sumber tertulis berupa buku, literatur, studi pustaka, surat kabar, karya ilmiah dan lain sebagai sebagainya.

Teknik keabsahan data didasarkan pada empat kriteria penelitian oleh Moleong yaitu derajat *credibility*, *transferability*, dan *confirmability*. Proses analisa data interaktif dilandaskan menurut konsep Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, hingga verifikasi data. Pada penelitian ini Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menunjang segala data dan informasi.

IV. Hasil dan Pembahasan

Penerapan SAKTI di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur telah membawa banyak kemudahan dan perubahan dalam hal pengelolaan keuangan baik yang dirasakan langsung oleh pegawai maupun lingkungan kantor sendiri. Untuk melihat keberhasilan penggunaan SAKTI, hasil analisa dirangkum dalam bentuk pemaparan fenomena yang terjadi selama penelitian sebagai berikut:

1. *People*

Indikator ini difokuskan untuk menganalisis pada sumber daya manusia yang mendukung keberhasilan penerapan SAKTI, yang dilihat dari:

a. Kuantitas dan Kualitas Penetapan *User* Pegawai

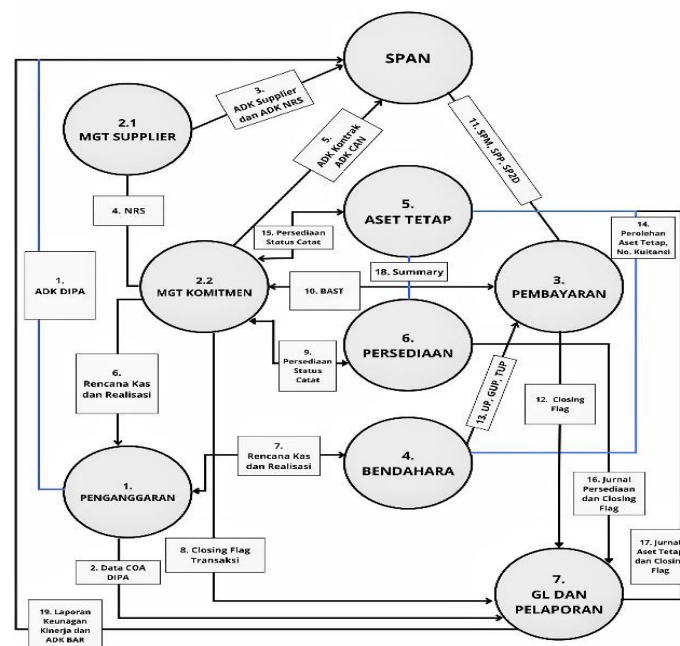
Kecukupan secara kuantitas (jumlah) berfokus pada berapa banyak pegawai yang dibutuhkan untuk memenuhi kualifikasi tugas, sedangkan kualitas (pengalaman) berfokus pada seberapa kemampuan seorang pegawai memahami pekerjaannya. Kepala Kantor akan mengeluarkan Surat Keputusan penetapan pegawai setiap awal tahun dengan memilih pegawai dengan persamaan pelaksanaan tugas berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional. Desentralisasi tugas ini bertujuan untuk mengefisiensi kerja tanpa melibatkan pegawai dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penetapan *user* telah dilakukan secara normatif berdasarkan regulasi tertulis. Disisi lain akan muncul sebuah masalah jika seorang pegawai melakukan pensiun. Kekosongan tugas yang ada harus dilakukan oleh pegawai yang tersisa, sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya penyimpangan pencatatan transaksi keuangan. Namun hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai dan organisasi.

b. Pelatihan User Pegawai

Dalam tujuan memenuhi tuntutan kerja dalam hal pengelolaan keuangan, semua pegawai sebagai *user* diharuskan memahami, menguasai, dan mengoperasikan sistem dengan baik. Guna mewujudkan hal ini maka Kementerian Keuangan melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan mengadakan pelatihan secara langsung dan rutin kepada pegawai melalui metode *training of trainer*. Disamping itu Kementerian melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Keuangan Umum melakukan pelatihan *learning by doing* yang dilakukan sendiri oleh pegawai di *website Kemenkeu Learning Center*. *Website* ini telah menyediakan banyak pelatihan wajib yang diakses secara 24 jam.

2. Procedure

Mekanisme proses alur kerja dan alur data antar modul SAKTI adalah menggabungkan fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, sampai fungsi pertanggungjawaban anggaran melalui konsep *single database*. Prosedur ditekankan kepada *user* agar dapat melakukan pengolahan dan pencarian data dengan baik. Prosedur telah dijalankan dan diimplementasikan secara terstruktur dan sistematis berdasarkan instruksi tetap. Seluruh proses transaksi akuntansi dan pelaporan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dijelaskan dalam gambar berikut:



Gambar 1 Mekanisme Alur Kerja dan Alur Data Antar Modul SAKTI

Sumber : Data Penelitian (2022)

3. Data

Indikator ini akan melihat apa saja data informasi yang dibutuhkan dalam dasar pengambilan keputusan serta cara penanganan jika terjadi kesalahan. Data meneliti beberapa hal diantaranya:

a. Kebutuhan Dokumen

Dokumen diolah untuk menghasilkan informasi penting. Kantor telah menyediakan setiap dokumen berdasarkan langkah/prosedur sehingga tidak memberikan kesulitan pegawai untuk mencari kembali dokumen saat proses penginputan data.

b. Kesesuaian Isi Dokumen

Guna mendeteksi adanya kesalahan data maka butuh suatu tindakan pengecekan ulang (*auto correct*) baik melalui sistem maupun *user* sendiri. Proses *edit* telah disediakan di setiap menu modul. Adanya menu *edit* disini berguna untuk meminimalisir risiko adanya kesalahan, sehingga proses input selanjutnya tidak bermasalah. Pegawai sangat dituntut untuk memiliki ketelitian saat proses *entry data*. Ketika kinerja semakin baik maka fokus pegawai juga akan semakin meningkat sehingga tidak terjadi suatu gangguan pada keseluruhan proses pengelolaan data.

4. Software

Software didalam komputer berguna untuk memberikan kemudahan pengelolaan tata kelola organisasi sehingga akan dihasilkan informasi yang saling dibutuhkan oleh pegawai. *Software* akan meneliti dan menganalisis hal diantaranya:

a. Tersedianya Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi adalah serangkaian interkoneksi yang berhubungan satu sama lainnya. Kecepatan tiap internet dihitung dari jumlah data yang dikirimkan dalam satuan waktu tertentu. SAKTI yang merupakan sistem yang berpusat pada satu basis data pasti akan membutuhkan dukungan teknologi dan jaringan yang sangat baik. Kecepatan akses SAKTI telah dikatakan sangat baik, karena Kementerian Keuangan telah menjalin kerjasama terkait lisensi operasi penyediaan jasa jaringan tetap lokal di lingkungan Kementerian dengan PT. Telkom Indonesia Tbk. selaku operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Diketahui PT. Telkom Indonesia pada 2021 telah mengoperasikan sebesar 245.710 *Base Transceiver Station* (BST) di seluruh wilayah Indonesia.

b. Spesifikasi Perangkat

Spesifikasi komputer yang tepat akan bermanfaat untuk menambah produktivitas kerja. Dalam penerapan SAKTI tidak membutuhkan spesifikasi khusus yang dapat dibuktikan dalam tabel perbandingan spesifikasi perangkat yang digunakan oleh pegawai *user*. Hasilnya perbedaan spesifikasi yang ada tidak menimbulkan masalah pengolahan data serta keseluruhan kinerja SAKTI.

Tabel 1. Spesifikasi Perangkat

No.	Nama Produk Perangkat Informan	Processor
1.	Asus D6HEMQOU 4GB RAM	Intel® Core™ i3-7020U CPU @ 2.30 GHz
2.	Asus A455UR 8GB RAM	Intel® Core™ i7-7200U CPU @ 3.40 GHz
3.	Lenovo 21H2 6GB RAM	Intel® Core™ i5-4200M CPU @2.50 GHz
4.	HP 14 Notebook PC 4GB RAM	Intel® Pentium® CPU N3530 @ 2.16 GHz

Sumber : Data Penelitian (2022)

c. Keamanan Data

Peningkatan keamanan yang dibantu oleh perangkat keras akan mampu melengkapi protokol dan meningkatkan kebersihan keamanan secara keseluruhan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Pusat telah dibantu oleh Direktorat SITP (Sistem Informasi yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2018 Tentang Monitoring Data Transaksi Penerimaan Negara & Teknologi Perbendaharaan dan didukung oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (PUSINTEK) Keuangan sebagai operator keamanan sistem yang disediakan oleh kantor pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian. Tugas dua bidang tersebut adalah untuk melaksanakan kebijakan layanan teknologi informasi dan komunikasi serta mengelola infrastruktur dan fasilitas, jaringan, aplikasi, basis, keamanan pusat data.

5. *Information Technology Infrastructure*

Teknologi yang merupakan unsur utama dari suatu penerapan *e-government* mempunyai peranan penting sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan strategi, mengurangi biaya operasional, dan lainnya. *Information Technology Infrastructure* mengkaji mengenai:

a. Pengadaan Sarana Prasarana

Pengadaan sarana dan prasarana dapat diukur dengan upaya menyediakan perangkat teknologi dalam menunjang pekerjaan. Penyediaan sarana prasarana pada Kanwil DJPb Prov. Jatim telah dilakukan menurut sesuai anggaran dana yang telah ditetapkan dalam APBN yang disahkan oleh Undang-Undang. Setelah APBN disahkan maka akan terbentuk suatu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang selanjutnya digunakan sebagai dokumen acuan pengadaan belanja barang/jasa di setiap lingkungan satuan kerja. Penjelasan singkat langkah pelaksanaan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang alokasi dananya telah terdaftar dalam DIPA akan dilaksanakan dengan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk perjanjian kontrak untuk kegiatan pengadaan jasa maupun barang (*supplier*).
3. Pembayaran dilakukan baik sebelum maupun setelah jasa atau barang diterima. Pembayaran dilakukan dalam dua cara baik secara langsung (LS) maupun melalui Uang Persediaan (UP) yang dipersyaratkan oleh pihak *supplier* dengan penyampaian jaminan.
4. Setelah seluruh transaksi telah terjadi, Bendahara akan membuat laporan pengeluaran berupa kwitansi yang kemudian akan diproses dan diolah menjadi laporan realisasi anggaran.

Segala bentuk pengadaan sarana prasarana di Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b. Pemeliharaan Sarana Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana diartikan sebagai kegiatan mengurus dan mengatur sarana dan prasarana sehingga selalu dalam keadaan baik. Pemeliharaan pada Kanwil DJPb Prov. Jatim dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan dan penggunaan masing-masing alat kerja. Pertimbangan waktu dalam pemeliharaan dapat membantu menghindari masalah yang timbul karena keterlambatan pembaruan dengan alat yang baru.

6. Pengendalian Internal

Pengendalian internal berarti kegiatan untuk menjaga keamanan data perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, serta mencegah penyelewengan aktivitas organisasi. Analisis pengendalian internal menurut kriteria dijelaskan sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi

Instansi akan mengawasi dan mengevaluasi apakah segala aktivitas yang dilakukan berfungsi dengan baik. Segala aktivitas akan dilihat dan dievaluasi apakah kegiatan tersebut menimbulkan masalah sehingga dapat diambil antisipasi pencegahannya. Pelaksanaan SAKTI dipantau langsung oleh Bidang Seksi Kepatuhan Internal dibawah kewenangan Kanwil DJPb dan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan pengendalian internal secara terintegrasi, tugas bidang Kepatuhan Internal diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

b. Komunikasi dan Informasi

Instansi akan melakukan komunikasi pertukaran informasi secara internal guna melakukan pengendalian. Komunikasi ini bisa dilakukan secara langsung maupun melalui sebuah sistem. Kanwil DJPb Prov. Jatim telah menyediakan layanan *call center* sebagai wadah pertukaran informasi yaitu HAI-DJPb yang dapat diakses selama 24 jam. Sistem ini mampu menampung dan menangani kebutuhan, keluhan, serta masukan pegawai sehingga mampu meningkatkan efisiensi kinerja. Kegiatan guna menjamin layanan terintegrasi telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan *Help, Answer, Improve* Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

V. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan analisis yang dilihat dari enam indikator konsep Sistem Informasi Akuntansi menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: *Pertama*, SAKTI yang merupakan aplikasi terintegrasi yang dibuat karena adanya permasalahan pelaporan keuangan instansi telah mampu menjadi inovasi di lingkungan Kementerian/Lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama dan komunikasi Pemerintah Pusat dengan seluruh satuan kerja sudah dilaksanakan dengan baik. Dari semua analisis dapat diketahui bahwa keseluruhan pelaksanaan berjalan positif dengan beberapa permasalahan kecil. *Kedua*, faktor pendukung pelaksanaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari eksternal adalah adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk penganggaran yang baik, regulasi, dan kerjasama dengan penyedia barang dan jasa. *Ketiga*, faktor penghambat antara lain kurangnya manajemen tentang ketersediaan sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan pemberian tugas yang menimbulkan tekanan pada diri tiap pegawai.

Saran

Saran masukan berdasarkan hasil analisa dalam penelitian ini sebagai berikut; *Pertama*, bagi instansi yaitu diperlukan pengelolaan sumber daya yang lebih intensif untuk memetakan fungsi dan kewenangan pegawai, meningkatkan upaya penyediaan operator jaringan telekomunikasi penyedia operator jaringan telekomunikasi, serta mempertahankan kualitas kinerja yang baik secara terus menerus. *Kedua*, bagi Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji lebih dalam bagaimana proses keterikatan aplikasi, menunjang

keterbatasan perolehan data dengan mengkaji lebih dalam melalui sumber yang tersedia, serta mampu mempersiapkan lebih banyak bahan temuan data.

DAFTAR PUSTAKA

- A Batinggi, B. A. 2013. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Antara, K. B. 2022,. *ANTARA KANTOR BERITA INDONESIA*. Diambil kembali dari Sri Mulyani dorong Kemenkeu kembangkan inovasi sistem data digital: <https://www.antaraneews.com/berita/2668293/sri-mulyani-dorong-kemenkeu-kembangkan-inovasi-sistem-data-digital>
- Indrajit, R. E. 2002. *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*
- Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-34/PB/2013 Tentang Tata Kelola Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan *Help, Answer, Improve* Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2018 Tentang Monitoring Data Transaksi Penerimaan Negara & Teknologi Perbendaharaan
- Romney Marshall dan Paul Steinbart. 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sofia, I. P.. *MODUL SISTEM INFORMASI AKUNTANSI*. Jakarta: Universitas Pembangunan Jaya.